

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Sekolah

Penelitian ini dilaksanakan di empat sekolah menengah pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Sleman, SMP Muhammadiyah 1 Godean, SMP Muhammadiyah 2 Godean dan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan. Guna mengetahui gambaran tentang keempat sekolah tersebut, dilakukan pendataan sekolah dengan metode dokumentasi, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk profil sekolah sebagai berikut:¹

a) SMP Muhammadiyah 1 Sleman

SMP Muhammadiyah 1 Sleman didirikan pada tahun 1947 oleh Persyarikan Muhammadiyah. Beralamatkan di Dusun Panggeran, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Sekolah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, baik secara perkembangan jumlah peserta didik ataupun perkembangan yang lainnya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain.

Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2017/2018 mencapai 304 peserta didik terdiri dari 171 peserta didik laki-laki dan 133 peserta didik perempuan. Rombongan belajar yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Sleman sebanyak 10 rombongan belajar.

¹ Hasil dokumentasi profil sekolah dan obseravsi pada tanggal 5,6,7,8,9, Mei 2018

Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Sleman dalam 3 tahun terakhir adalah:

Tabel 1.1.
Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Sleman

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik ABK
1.	2015/2016	256	15
2.	2016/2017	289	19
3.	2017/2018	304	20

Data jumlah guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Sleman pada tahun ajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Data jumlah guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Sleman

No.	Guru dan Karyawan	Jumlah	Keterangan
1.	Guru PNS	4	Bersertifikasi
2.	Guru GTY	6	Bersertifikasi
3.	Guru GTY	7	Belum Bersertifikasi
4.	Guru GTT	5	Belum bersertifikasi
5.	Karyawan PTY	4	-

6.	Karyawan PTT	3	-
	Jumlah	29	-

Visi dari SMP Muhammadiyah 1 Sleman adalah: “Terbentuknya peserta didik yang taqwa, cerdas, berbudaya.” Adapun misi dari SMP Muhammadiyah 1 Sleman adalah: “Melaksanakan pembelajaran secara efektif, Memberikan senang membaca Al-Qur’an.

Sarana dan prasarana SMP Muhammadiyah 1 Sleman dengan akreditasi A, telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dari jenis sarana prasarana, ukuran, maupun jumlah sarana prasarana yang dimiliki, seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang bimbingan konseling, ruang terbuka, ruang UKS, kantin sekolah, lapangan olah raga, sarana ibadah (masjid) serta buku paket dan buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah. Meskipun sarana prasarana telah memenuhi SPM, tetapi keberadaan sarana pendukung pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Sleman belum terpenuhi, baik itu dari ruang inklusif sampai dengan alat bantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

b) SMP Muhammadiyah 1 Moyudan

SMP Muhammadiyah 1 Moyudan didirikan pada tahun 1974 oleh Persyarikan Muhammadiyah. Beralamatkan di Desa Sumberahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Sekolah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari

tahun ketahun, baik secara perkembangan jumlah peserta didik ataupun perkembangan yang lainnya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain.

Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2017/2018 mencapai 167 peserta didik terdiri dari 113 peserta didik laki-laki dan 54 peserta didik perempuan. Rombongan belajar yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Moyudan sebanyak 6 rombongan belajar..

Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Moyudan dalam 3 tahun terakhir adalah:

Tabel 1.3.
Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Moyudan

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik ABK
1.	2015/2016	101	8
2.	2016/2017	123	11
3.	2017/2018	167	10

Data guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan pada tahun ajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Data jumlah guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan

No.	Guru dan Karyawan	Jumlah	Keterangan
1.	Guru PNS	2	Bersertifikasi

2.	Guru GTY	2	Bersertifikasi
3.	Guru GTY	3	Belum Bersertifikasi
4.	Guru GTT	3	Belum bersertifikasi
5.	Karyawan PTY	2	-
6.	Karyawan PTT	2	-
	Jumlah	14	-

Visi dari SMP Muhammadiyah 1 Moyudan adalah: “Terbentuknya peserta didik yang luhur dalam budi pekerti, unggul dalam prestasi”. Adapun Misi dari SMP Muhammadiyah 1 Moyudan adalah: “Membentuk anak berbudi pekerti luhur berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul; mendidik anak cerdas, terampil dan pintar; menyiapkan kader Muhammadiyah yang tangguh.”

Sarana dan prasarana SMP Muhammadiyah 1 Moyudan dengan akreditasi A, telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dari jenis sarana prasarana, ukuran, maupun jumlah sarana prasarana yang dimiliki, seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang bimbingan konseling, ruang terbuka, ruang UKS, lapangan olah raga, sarana ibadah (masjid), hanya saja buku paket dan buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah belum terpenuhi dikarenakan dibutuhkan dana yang mencukupi. Meskipun sarana prasarana telah memenuhi SPM, tetapi keberadaan sarana pendukung

pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Moyudan belum terpenuhi, baik dari ruang inklusif sampai dengan alat bantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

c) SMP Muhammadiyah 2 Godean

SMP Muhammadiyah 2 Godean didirikan pada tahun 1979 oleh Persyarikan Muhamadiyah. Beralamatkan di Dusun Sembuh Lor, Desa Sidomulyao, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Sekolah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ketahun, baik secara perkembangan jumlah peserta didik ataupun perkembangan yang lainnya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain.

Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2017/2018 mencapai 296 peserta didik terdiri dari 175 peserta didik laki-laki dan 121 peserta didik perempuan. Rombongan belajar yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Godean sebanyak 11 rombongan belajar.

Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Godean dalam 3 tahun terakhir adalah:

Tabel 1.5.
Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Godean

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik ABK
1.	2015/2016	267	15
2.	2016/2017	278	20
3.	2017/2018	296	19

Data guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 2 Godean pada tahun ajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6.
Data jumlah guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 2 Godean

No.	Guru dan Karyawan	Jumlah	Keterangan
1.	Guru PNS	3	Bersertifikasi
2.	Guru GTY	6	Bersertifikasi
3.	Guru GTY	4	Belum Bersertifikasi
4.	Guru GTT	5	Belum bersertifikasi
5.	Karyawan PTY	4	-
6.	Karyawan PTT	2	-
	Jumlah	24	-

Visi dari SMP Muhammadiyah 2 Godean adalah: “Terbentuknya peserta didik yang berbudi pekerti yang luhur, berkhak mulia, dan memiliki keterampilan serta berprestasi”. Adapun Misi dari SMP Muhammadiyah 2 Godean adalah: “Menanamkan sikap dan perilaku sopan santun; menanamkan ajaran agama yang diabnutnya untuk menjadi pedoman hidup; menggali dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik agar memiliki ketrampilan sebagai kebijakan hidupnya; melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif agar peserta didik mendalami ilmu pengetahuan; memotivasi peserta didik menempuh pendidikan yang lebih tinggi.”

Sarana dan prasarana SMP Muhammadiyah 2 Godean dengan akreditasi A, telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dari jenis sarana prasarana, ukuran, maupun jumlah sarana prasarana yang dimiliki, seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang bimbingan konseling, ruang terbuka, ruang UKS, kantin sekolah, lapangan olah raga, sarana ibadah (masjid) serta buku paket dan buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah. Meskipun sarana prasarana telah memenuhi SPM, tetapi keberadaan sarana pendukung pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 2 Godean belum terpenuhi, baik dari ruang inklusif sampai dengan alat bantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

d) SMP Muhammadiyah 1 Godean

SMP Muhammadiyah 1 Godean didirikan pada tahun 1965 oleh Persyarikan Muhammadiyah. Beralamatkan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Sekolah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ketahun, baik secara perkembangan jumlah peserta didik ataupun perkembangan yang lainnya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain.

Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2017/2018 mencapai 472 peserta didik terdiri dari 310 peserta didik laki-laki dan 162 peserta didik perempuan. Rombongan belajar yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Godean sebanyak 15 rombongan belajar.

Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Godean dalam 3 tahun terakhir adalah:

Tabel 1.7
Data jumlah peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Godean

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik ABK
1.	2015/2016	443	21
2.	2016/2017	456	24
3.	2017/2018	472	23

Data guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Godean pada tahun ajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8.

Data jumlah guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Godean

No.	Guru dan Karyawan	Jumlah	Keterangan
1.	Guru PNS	5	Bersertifikasi
2.	Guru GTY	10	Bersertifikasi
3.	Guru GTY	8	Belum Bersertifikasi
4.	Guru GTT	7	Belum bersertifikasi
5.	Karyawan PTY	5	-
6.	Karyawan PTT	4	-
	Jumlah	39	-

Visi dari SMP Muhammadiyah 1 Godean adalah: “Terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi bebudaya dan cinta tanah air.” Adapun Misi dari SMP Muhammadiyah 1 Godean adalah: “Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dengan memaksimalkan media pembelajaran; meningkatkan keaktifan didalam beragama Islam sesuai al-Qur’an dan Sunnah Nabi; menggali potensi akademik dan non akademik untuk mewujudkan dan meningkatkan prestasi peserta didik; antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi; menumbuhkembangkan budaya yang berkarakter, cinta kebersihan, keindahan dan cinta tanah air.”

Sarana dan prasarana SMP Muhammadiyah 1 Godean dengan akreditasi A, telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dari jenis sarana prasarana, ukuran, maupun jumlah sarana prasarana yang dimiliki, seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang bimbingan konseling, ruang terbuka, ruang UKS, kantin sekolah, lapangan olah raga, sarana ibadah (masjid) serta buku paket dan buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah. Meskipun sarana prasarana telah memenuhi SPM, tetapi keberadaan sarana pendukung pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Godean belum terpenuhi, baik dari ruang inklusif sampai dengan alat bantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. Dalam

mengevaluasi tersebut dipergunakan metode *CIPP* yang meliputi empat tahapan evaluasi, yaitu tahap konteks, input, proses dan output. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Tahapan konteks evaluasi ini merupakan tahapan yang memuat tentang latar belakang pendidikan inklusif, tujuan dilaksanakan pendidikan inklusif. Adapun Input evaluasi merupakan tahapan yang memuat tentang input peserta didik, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan sekolah, serta kurikulum sekolah. Proses merupakan tahapan pengelolaan dan pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, output meliputi hasil akademik dan non akademik bagi peserta didik ABK.

Berdasarkan hasil tahapan evaluasi dengan metode *CIPP*, akan dikaji pula apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung sehingga program pendidikan inklusif dapat terlaksana bagi empat SMP Muhammadiyah yang diteliti, serta beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan evaluasi, data primer yang terkumpul terlebih dahulu divalidasi, direduksi dan disajikan dalam bentuk tabel. Data primer akan diolah dengan evaluasi konteks diambil dari wawancara dengan kepala sekolah, sedangkan data untuk evaluasi input, proses dan output diambil dari wawancara dengan guru penanggungjawab pendidikan inklusif.

Dalam penelitian ini data awal sebagai informasi tambahan diperoleh dengan cara mendokumentasikan administrasi sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan inklusi serta data sekunder berupa studi dokumentasi kepada kasi kurikulum Dinas pendidikan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data yang terkumpul kemudian direduksi dan dituangkan dalam bentuk tabel, kemudian didiskripsikan dengan menggunakan analisa kualitatif interpretatif, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian.

a. Hasil dan Pembahasan Data Konteks

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah di empat sekolah menengah pertama (SMP) Muhammadiyah di kabupaten Sleman, serta melalui dokumentasi dapat terkumpul data-data hasil wawancara. Dari data tersebut kemudian dilakukan reduksi data, sehingga dapat tersajikan data sebagai berikut:

Tabel 1.9.

Reduksi Data Konteks Hasil Wawancara dan dokumentasi

No.	Data	SMP Muh 1 Sleman	SMP Muh 1 Godean	SMP Muh 2 Godean	SMP Muh 1 Moyudan
1.	Latar Belakang	ada	ada	ada	ada
2.	Tujuan program	ada	ada	ada	ada
3.	Sasaran program	ada	ada	ada	ada
4.	Ijin operasional	ada	ada	ada	ada
5.	Dokumen Program	ada	ada	ada	ada
6.	Struktur Organisasi	ada	ada	ada	ada

- 1) Hasil Data Konteks SMP Muhammadiyah 1 Sleman

Data tersebut menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 1 Sleman dalam melaksanakan pendidikan inklusif memiliki latar belakang. Hal itu disampaikan oleh kepala sekolah Bpk. Hasanudin, S.Pd.I melalui wawancara, bahwa: “Keberagaman anak yang masuk di SMP Muhammadiyah 1 Sleman, masuk dalam kategori peserta didik berkebutuhan khusus, sementara orang tuanya enggan menyekolahkan anaknya ke SLB, karena menganggap anaknya tidak termasuk berkebutuhan khusus. Selain itu sejak tahun 2008, sekolah ini sudah melaksanakan pendidikan inklusif, meskipun secara legal formal belum mendapatkan ijin operasional dari pemerintah. Sekolah ini baru mendapatkan ijin operasional pada tahun 2015.”²

Sementara itu tujuan diselenggarakan pendidikan inklusif, menurut Bpk. Hasanudin, S.Pd.I. adalah “Memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus; memberikan akses seluas-luasnya terhadap hak anak untuk wajib belajar; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.”³

Program pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Sleman telah tersusun di awal tahun ajaran, dan merupakan dokumen yang dimasukkan dalam dokumen kurikulum. Adapun sasaran program pendidikan inklusif menurut Bpk. Hasanudin, S.Pd.I adalah masyarakat sekitar sekolah yang anaknya tergolong berkebutuhan khusus sehingga tidak perlu jauh-jauh dalam menyekolahkan anaknya.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Hasanudin, S.Pd.I, pada Tanggal 5 Mei 2018

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasanudin, S.Pd.I, pada Tanggal 5 Mei 2018

Dalam melangsungkan pendidikan inklusif SMP Muhammadiyah 1 Sleman, telah mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2015.⁴

2) Hasil Data Konteks SMP Muhammadiyah 1 Godean

Berdasarkan tabel 1.9. menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 1 Godean dalam melaksanakan pendidikan inklusif memiliki latar belakang. Hal tersebut telah diutarakan oleh kepala sekolah Bpk. Nurwahid Sidarta, S.Pd. melalui wawancara, bahwa “Peserta didik baru SMP Muhammadiyah 1 Godean memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Kondisi tersebut mempengaruhi kondisi peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Godean, yang diantaranya memiliki kebutuhan khusus, sehingga harus dilaksanakan pendidikan secara inklusif.”⁵

Sementara itu tujuan diselenggarakan pendidikan inklusif, menurut Bpk. Nurwahid Sidarta, S.Pd. adalah “Melaksanakan pembelajaran yang sama bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus; mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus; Memberikan bekal ibadah dan ketrampilan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.”⁶

Program pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Godean telah tersusun di awal tahun ajaran, dan merupakan dokumen yang dimasukkan dalam dokumen kurikulum. Adapun sasaran program pendidikan inklusif menurut Bpk. Nurwahid Sidarta, S.Pd. adalah “Semua peserta didik baru lulusan sekolah dasar yang mau melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.”

⁴ Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, 2015, *Ijin Operasional Sekolah Inklusif, Sleman*

⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Nurwahid Sidarta, S.Pd. pada tanggal 6 Mei 2018

⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Nurwahid Sidarta, S.Pd. pada tanggal 6 Mei 2018

Dalam melangsungkan pendidikan inklusif SMP Muhammadiyah 1 Godean, telah mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2015.⁷

3) Hasil Data Konteks SMP Muhammadiyah 2 Godean

Berdasarkan tabel 1.9. menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 2 Godean dalam melaksanakan pendidikan inklusif memiliki latar belakang. Hal tersebut telah diutarakan oleh kepala sekolah Bpk. Triwinarno, S.Pd. melalui wawancara, bahwa “SMP Muhammadiyah 2 Godean dari tahun 2010 telah melaksanakan pendidikan inklusif dan terdapat peserta didiknya yang berprestasi non akademik memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda sehingga kondisi tersebut mempengaruhi pula kondisi peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Godean, yang diantaranya memiliki kebutuhan khusus, sehingga harus dilaksanakan secara inklusif.”⁸

Sementara itu tujuan diselenggarakan pendidikan inklusif, menurut Bpk. Triwinarno, S.Pd. adalah “Memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak belajarnya selama 9 tahun; melaksanakan pembelajaran yang sama bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus; membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan beberapa kecakapan hidup.”⁹

Program pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 2 Godean telah tersusun di awal tahun ajaran, dan merupakan dokumen yang dimasukkan dalam dokumen kurikulum.

Adapun sasaran program pendidikan inklusif menurut Bpk. Triwinarno, S.Pd. adalah

⁷ Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, 2015, *Ijin Operasional Sekolah Inklusif, Sleman*

⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Triwinarno, S.Pd. pada tanggal 9 Mei 2018

⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Triwinarno, S.Pd. pada tanggal 9 Mei 2018

“Masyarakat sekitar sekolah yang memiliki anak usia SMP dengan keterbatasan fisik maupun mental.”

Dalam melangsungkan pendidikan inklusif SMP Muhammadiyah 2 Godean, telah mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2015.¹⁰

4) Hasil Data Konteks SMP Muhammadiyah 1 Moyudan

Berdasarkan tabel 1.9. menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 1 Moyudan dalam melaksanakan pendidikan inklusif memiliki latar belakang. Hal tersebut telah diutarakan oleh kepala sekolah Bpk. Tri Budi Muriana, S.T. melalui wawancara, bahwa ”SMP Muhammadiyah 1 Moyudan merupakan sekolah pinggiran yang memiliki peserta didik dengan berbagai latar belakang, baik kondisi peserta didik, prestasi akademik, latar belakang orang tua, sehingga dari latar belakang itulah SMP Muhammadiyah 1 Moyudan menyelenggarakan pendidikan inklusif.”¹¹

Sementara itu tujuan diselenggarakan pendidikan inklusif, menurut Bpk. Tri Budi Muriana, S.T. adalah “Menyelenggarakan pendidikan bagi semua kalangan peserta didik; menjadikan sekolah yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus, dengan membekali mereka pada ketrampilan, pembiasaan pada nilai-nilai agama, sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur.”¹²

Program pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Moyudan telah tersusun di awal tahun ajaran, dan merupakan dokumen yang dimasukkan dalam dokumen kurikulum.

Adapun sasaran program pendidikan inklusif menurut Bpk. Tri Budi Muariana, S.T.

¹⁰ Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, 2015, *Ijin Operasional Sekolah Inklusif, Sleman*

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Tri Budi Muriana pada tanggal 9 Mei 2018

¹² Hasil Wawancara dengan Bpk. Tri Budi Muriana pada tanggal 9 Mei 2018

adalah “Peserta didik disekitar sekolah pada usia sekolah menengah pertama yang belum mengikuti pendidikan di jenjang SMP.”

Dalam melangsungkan pendidikan inklusif SMP Muhammadiyah 1 Moyudan, telah mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2015.¹³

5) Evaluasi data konteks empat sekolah pertama Muhammadiyah

Berdasarkan hasil evaluasi konteks terhadap empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah, maka jika ditinjau dari konsep pendidikan inklusif, dapat disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 1.10
Evaluasi Data Konteks Empat Sekolah Muhammadiyah

No.	Prinsip pendidikan inklusif	1	2	3	4
1.	Berorientasi pada ABK (Permendiknas No. 70/2009 pasal 3 ayat 1)	v	v	v	v
2.	Berlangsung bersama (regular), tidak diskriminasi (Direktorat Pembina PKLK, 2012, pasal 2)	v	v	v	v
3.	Dokumen Program (Permendiknas No. 70/2009 pasal 7)	v	v	v	v
3	Mendapatkan Ijin operasional (Permendiknas No. 70/2009 pasal 4 ayat 1)	v	v	v	v

Ket :

- 1 = SMP Muhammadiyah 1 Sleman
- 2 = SMP Muhammadiyah 1 Godean
- 3 = SMP Muhammadiyah 2 Godean
- 4 = SMP Muhammadiyah 1 Moyudan

v = terpenuhi/terlaksana

¹³ Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, 2015, *Ijin Operasional Sekolah Inklusif, Sleman*

Berdasarkan tabel di atas, dilaksanakannya program pendidikan inklusif di empat Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kabupaten Sleman sudah relevan dengan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pendidikan inklusif, yaitu :

- a) Permendiknas No. 70, tahun 2009, pasal 3 ayat 1, bahwa “peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”
- b) Direktorat PKLK, tahun 2012, pasal 2, bahwa “Sekolah reguler dengan orientasi inklusif tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua...”
- c) Permendiknas No. 70 pasal 4 ayat 1 dimana “Pemerintah kabupaten/kota minimal menunjuk satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- d) UU nomor 20 tahun 2003 tentang SPN, khususnya pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

b. Hasil dan Pembahasan Data Input

Berdasarkan kegiatan wawancara kepada Guru penanggung jawab program pendidikan inklusif serta hasil dokumentasi di empat sekolah menengah pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman, dapat terkumpul data-data hasil wawancara dan dokumentasi. Dari data tersebut kemudian dilakukan reduksi data, sehingga dapat tersajikan data sebagai berikut:

Tabel 1.11.

Reduksi Data Input Hasil Wawancara dan Dokumentasi

No.	Data	SMP Muh 1 Sleman	SMP Muh 1 Godean	SMP Muh 2 Godean	SMP Muh 1 Moyudan
1.	Jumlah Peserta didik	304	460	296	167
2.	Jumlah Peserta didik Inklusif	20	23	19	10
3.	Jumlah ABK dalam 1 Kelas	2	2	2	2
3.	Jumlah Guru Karyawan	29	39	24	14
4.	Guru Pendamping Khusus	1	1	1	1

Hasil validasi dan reduksi data seperti dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa masing-masing sekolah memiliki peserta didik inklusif. SMP Muhammadiyah 1 Sleman pada tahun 2017/2018 memiliki jumlah peserta didik sebanyak 304, sementara jumlah peserta didik inklusif adalah 20, sehingga jika diprosentase sebanyak 6,2 %. Selain itu dalam melaksanakan program pendidikan inklusif, di SMP Muhammadiyah 1 Sleman telah tersedia 1 guru pendamping Khusus(GPK) yang merupakan sumber daya yang sangat berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Sementara itu SMP Muhammadiyah 1 Godean pada tahun 2017/2018 jumlah peserta didiknya adalah 460, sementara jumlah peserta didik inklusif adalah 28, atau sebanyak 7,10 %. Selain itu dalam melaksanakan program pendidikan inklusif, di SMP Muhammadiyah 1 Godean telah tersedia 1 guru pendamping khusus(GPK) yang

merupakan sumber daya yang sangat berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

SMP Muhammadiyah 2 Godean memiliki pada tahun 2017/2018 jumlah peserta didiknya adalah 296, sementara jumlah peserta didik inklusif adalah 19 atau sebanyak 6,4 %. Selain itu dalam melaksanakan program pendidikan inklusif, di SMP Muhammadiyah 2 Godean telah tersedia 1 guru pendamping khusus(GPK) yang merupakan sumber daya yang sangat berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Adapun untuk SMP Muhammadiyah 1 Moyudan pada tahun 2017/2018 jumlah peserta didiknya adalah 157, sementara jumlah peserta didik inklusif adalah 10. Jika dipersentase sebanyak 5,9 %. Selain itu dalam melaksanakan program pendidikan inklusif, di SMP Muhammadiyah 1 Sleman telah tersedia 1 guru pendamping khusus(GPK) yang merupakan sumber daya yang sangat berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan dari tabel 1.11. serta uraian di atas, menunjukkan bahwa keempat sekolah tersebut telah sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif yaitu:

1. Adanya Guru Pembimbing Inklusif (GPK) minimal 1 dalam satu satuan pendidikan, telah sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, pasal 10 ayat 1 dimana “Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sementara kenyataan di lapangan GPK akan dihapus pemerintah, harapannya semua guru di satuan pendidikan inklusif wajib memiliki kompetensi keinklusan.
2. Siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya dijadikan satu, hanya saja dalam 1 kelas tidak boleh lebih dari 2 jenis siswa ABK

yang sama dan tidak boleh lebih dari 5 ABK dalam 1 kelas. Hal ini telah sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, pasal 1, bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan siswa normal pada umumnya.

Dalam evaluasi data input, ditinjau pula tentang kurikulum, kegiatan bimbingan teknis pembelajaran inklusif, pembuatan perangkat pembelajaran inklusif, anggaran dana serta sarana prasarana sebagai pendukung proses pendidikan inklusif di sekolah.

Data yang diperoleh dikumpulkan, direduksi, sehingga diperoleh data seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.12.

Reduksi Data Input Hasil Wawancara dan Dokumnetasi

No.	Data	SMP Muh 1 Sleman	SMP Muh 1 Godean	SMP Muh 2 Godean	SMP Muh 1 Moyudan
1.	Kurikulum Inklusif	Ada	ada	Ada	ada
2.	Bimtek Pembelajaran Inklusif	Guru BK	Guru BK	Guru BK	Guru BK
3.	Perangkat Pembelajaran Individual	Belum lengkap	Belum lengkap	Belum lengkap	Belum lengkap
3.	Dana Khusus Sekolah Inklusif	ada	ada	ada	ada

4.	Ruang Terapi Inklusif	-	-	-	-
5.	Alat Bantu Inklusif	-	-	-	-
6.	Alat ketrampilan	ada	ada	ada	ada

Data tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan guru penanggung jawab program inklusif pada empat SMP Muhammadiyah di kabupaten Sleman. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kurikulum yang digunakan dalam program pendidikan inklusif, kegiatan bimbingan teknis kurikulum bagi pendidik serta perangkat pembelajaran individual dalam pembelajaran inklusif.

Kurikulum dalam program pendidikan inklusif memegang peranan penting karena sebagai acuan seorang pendidik dalam melaksanakan pendidikan. Di dalam pendidikan inklusif, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum *regular* (anak normal) yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, yang mengacu pada prinsip-prinsip: *relevansi*; praktis; fungsional; *fleksibilitas*; berorientasi pada peserta didik; *kontinuitas*; *integrative*; efisien dan efektifitas.

Berikut ini jawaban atas wawancara dengan guru penanggungjawab pendidikan inklusif di keempat sekolah yang diteliti.

Hasil wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 1 Sleman, sehubungan dengan kurikulum inklusif adalah sebagai berikut: bahwa Kurikulum Sekolah yang digunakan

adalah Kurikulum 2013, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.¹⁴

Sementara itu hasil wawancara dengan guru penanggung jawab program inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Godean adalah sebagai berikut: “Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, SMP Muhammadiyah 1 Godean menggunakan Kurikulum 2013, yang di dalamnya memuat ketentuan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus.”¹⁵

Adapun hasil wawancara terhadap guru penanggung jawab kegiatan inklusif di SMP Muhammadiyah 2 Godean adalah sebagai berikut: “Kami menggunakan Kurikulum 2013, yang didalamnya mengandung karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan prinsip-prinsip pembelajaran inklusif.”¹⁶

Sedangkan wawancara terhadap guru penanggung jawab inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Moyudan adalah sbb: “Pendidikan inklusif kami menggunakan Kurikulum 2013 yang didalamnya memuat prinsip-prinsip pembelajaran inklusif serta berpihak pada karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.”¹⁷

Berdasarkan tabel 1.12. bahwa kurikulum yang dipergunakan oleh empat SMP Muhammadiyah yang diteliti adalah kurikulum reguler yang menyesuaikan dengan prinsip inklusif, hal ini telah relevan dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 7 yang menyebutkan bahwa “Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan ABK sesuai minat, bakat dan potensi.”

¹⁴ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muh 1 Sleman pada tanggal 5 Mei 2018

¹⁵ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 1 Godean pada tanggal 6 Mei 2018

¹⁶ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 2 Godean pada tanggal 8 Mei 2018

¹⁷ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 1 Moyudan pada tanggal 9 Mei 2018

Struktur kurikulum yang digunakan oleh sekolah Muhammadiyah adalah struktur kurikulum 2013 bercirikan khusus Muhammadiyah dengan menyelenggarakan pendidikan ISMUBA (pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab). Pendidikan ISMUBA terinternalisasi dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan praktek pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembelajaran meliputi Pendidikan Fiqih, Pendidikan Aqidah Akhlak, Pendidikan Al-Qur'an Hadits, Pendidikan Kemuhammadiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, dengan struktur kurikulum 12 JP (jam pelajaran) bagi kelas 7 dan 8 dengan menggunakan kurikulum 2013, adapun struktur kurikulum kelas 9 terdiri dari 7 JP (jam pelajaran) dengan menggunakan kurikulum 2006. Sementara itu, untuk praktek pembelajaran berupa praktek ibadah seperti berwudlu, sholat dluha, sholat dluhur serta kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an (BTAQ) meliputi tadarus, tahfidz dan penuntasan bisa baca al-Qur'an.. Untuk kegiatan praktek pembiasaan dilaksanakan kegiatan Budaya 5 S(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kurikulum pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh empat SMP Muhammadiyah yang diteliti, telah melaksanakan ketentuan kurikulum sesuai dengan Ideologi Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini relevan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah PWM Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19.A/KEP/II.4/F/2011, "bahwa untuk melaksanakan fungsi dakwah dan kaderisasi di sekolah/madasarah Muhammadiyah perlu disusun Kurikulum dan buku teks Pendidikan al-Islam, Adapun ruang lingkup kurikulum pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA), meliputi:

- 1) Pendidikan Fiqih;
- 2) Pendidikan Aqidah Akhlak;

- 3) Pendidikan al-Qur'an Hadits;
- 4) Pendidikan Tarikh;
- 5) Pendidikan Kemuhammadiyah;
- 6) Bahasa Arab.

Salah satu kegiatan pengembangan kurikulum adalah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pendidik dan tenaga pendidik. Di dalam kegiatan Bimtek diharapkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang baik dalam keterlibatannya dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Berdasarkan tabel 1.12. bahwa keempat SMP Muhammadiyah yang diteliti dalam hal kegiatan bimtek belum melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan tersebut hanya diikuti oleh guru pembimbing khusus (GPK). Hal ini tidak relevan dengan prinsip pendidikan inklusif adalah prinsip keterlibatan yang dibenarkan oleh Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar Tahun 2012 bahwa “salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah prinsip keterlibatan, dimana pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.”

Selain kurikulum, salah satu hal terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan adalah tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif keempat SMP Muhammadiyah tersebut menggunakan dana BOS serta mendapatkan dana khusus bantuan program pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran Dana tambahan khusus bagi peserta didik inklusif sebesar Rp. 750.000 per tahun.

Sehubungan adanya dana tambahan bagi sekolah inklusif, hal ini sangat relevan dengan Permendiknas No. 70, tahun 2009 pasal 6 ayat 1, 2, 3 bahwa “Pemerintah

kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan ABK dan menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif, serta pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.”

Selain itu keberadaan alat atau sarana prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan inklusif di empat sekolah tersebut juga sangat menunjang terlaksananya pendidikan. Secara fisik sarana gedung dan ruang yang ada di keempat sekolah tersebut sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi sekolah, mulai dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium IPA dan komputer, tempat ibadah, kantin peserta didik, ruang BK ruang UKS ruang terbuka, kamar mandi, sudah memenuhi tingkat kelayakan penggunaan. Sedangkan sarana prasarana yang belum tersedia di keempat sekolah tersebut adalah ruang terapis dan alat bantu inklusi di keempat sekolah belum ada. Ruang terapis sangat membantu dalam melayani secara individual terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, sementara alat bantu terapis sangat berperan secara spesifik terhadap kekurangan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus, seperti *snellen chart*, *ishihara test*, *trial lens set*, *snellen chart electroni*, huruf dan penggaris *braille*, peta timbul, *abacus*, *reglet*, *stylus*, *scan list*, *hearing head*, dll.

Selain sarana prasarana di atas, untuk menunjang keterampilan bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah tersedia alat keterampilan. Seperti mesin jahit, alat sablon sudah dimiliki SMP Muhammadiyah 1 Sleman, begitu juga dengan SMP Muhammadiyah 1 Godean dan SMP Muhammadiyah 2 Godean juga memiliki mesin jahit, alat membatik, alat musik karawitan. Sementara itu SMP Muhammadiyah 1 Moyudan dalam rangka memberikan bekal keterampilan diberikan kegiatan bercocok tanam atau budaya sayuran atau hortikultural.

Berdasarkan uraian di atas, tidak tersedianya ruang terapis dan alat bantu spesifik inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tidak relevan dengan Permendiknas No. 70, tahun 2009 pasal 6 ayat 1, 2, 3 dimana pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan ABK dan menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif, serta pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Secara garis besar evaluasi data input pendidikan inklusif di empat SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman jika ditinjau dari ketentuan/prinsip yang diregulasikan pemerintah atau instansi terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13
Evaluasi Data Input Empat SMP Muhammadiyah
di Kabupaten Sleman

No.	Prinsip pendidikan inklusif	1	2	3	4
1.	Kurikulum memperhatikan kondisi ABK (Permendiknas No. 70/2009 pasal 7)	v	v	v	v
2.	Keterlibatan semua unsur (Direktorat Pembinaan PKLK Tahun 2012, pasal 1)	x	x	x	x
3.	Sarpras Inklusif (Permendiknas No. 70/2009 pasal 6 ayat 1, 2, 3)	x	x	x	x
4.	Subsidi Dana Inklusif (Permendiknas No. 70/2009 pasal 6 ayat 1, 2, 3)	v	v	v	v
5.	Terdapat minimal 1 GPK (Permendiknas No. 70 Tahun 2009, pasal 10 ayat 1)	v	v	v	v

Ket :

1 = SMP Muhammadiyah 1 Sleman

- 2 = SMP Muhammadiyah 1 Godean
- 3 = SMP Muhammadiyah 2 Godean
- 4 = SMP Muhammadiyah 1 Moyudan
- v = terpenuhi/terlaksana
- x = belum terpenuhi/terlaksana

Berdasarkan sajian data hasil evaluasi input, beberapa prinsip yang tidak terpenuhi (terlibatnya semua unsur dalam penyelenggaraan inklusif, bimbingan teknis hanya untuk guru penanggung jawab inklusif serta sarana prasarana inklusif yang tidak tersedia), menjadi faktor penghambat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini menjadi catatan penting bagi keempat SMP Muhammadiyah yang diteliti, untuk memperhatikan kembali faktor-faktor yang tidak terpenuhi, agar dapat direalisasikan sehingga harapannya proses pendidikan inklusif akan lebih meningkat.

c. Hasil dan Pembahasan Data Proses

Data untuk evaluasi proses diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan guru penanggung jawab program pendidikan inklusif serta hasil dokumentasi di empat sekolah menengah pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat terkumpul data-data kemudian dilakukan reduksi data, sehingga dapat tersajikan data-data sebagai berikut:

Tabel 1.14.

Reduksi Data Proses Hasil Wawancara dan Dokumnetasi

No.	Data	SMP Muh 1 Sleman	SMP Muh 1 Godean	SMP Muh 2 Godean	SMP Muh 1 Moyudan
1.	Asesmen Peserta didik	ya	ya	Ya	ya
2.	Kelas inklusif	ya	ya	Ya	ya

3.	Pmbelajaran khusus oleh GPK	ya	ya	Ya	ya
4.	Prinsip-prinsip pembelajaran inklusif	Belum semua guru	Belum semua guru	Belum semua guru	Belum semua gruru
5.	Kegiatan pembelajaran individual	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana
6.	Kegiatan Budaya Sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Kegiatan Keagamaan (ISMUBA)	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Kegiatan Ekstrakurikuler Peserta didik inklusif	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Evaluasi Hasil belajar	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Dukungan pemerintah dan lembaga terkait	Ada	Ada	Ada	ada
11.	Dukungan masyarakat	Belum Ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Tabel data di atas disusun berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru penanggungjawab program inklusif. Kondisi menunjukkan bahwa proses Asesmen peserta didik inklusif di awal penerimaan peserta didik baru telah dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, hanya saja yang membedakan dari keempat sekolah tersebut,

kegiatan asesmen di SMP Muhammadiyah 1 Sleman telah dilakukan oleh lembaga asesmen resmi dari pemerintah, sementara asesmen di SMP Muhammadiyah 1 Godean, SMP Muhammadiyah 2 Godean, SMP Muhammadiyah 1 Moyudan masih dilakukan oleh guru GPK bekerja sama dengan SLB terdekat.

Adapun hasil wawancara dengan guru penanggung jawab kegiatan inklusif untuk mengetahui kegiatan asesmen di SMP Muhammadiyah 1 Godean adalah sebagai berikut: “Pada saat kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dilaksanakan identifikasi terhadap peserta didik yang berkecenderungan berkebutuhan khusus, kemudian dipanggil Guru Pembimbing inklusif untuk memberikan asesmen, kemudian Guru GPK bekerja sama dengan SLB terdekat untuk melakukan asesmen.¹⁸ Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) diadakan di awal tahun pelajaran bersamaan dengan kegiatan (Forum Orientasi) FORTASI.

Kemudian hasil wawancara dengan guru penanggungjawab inklusif di SMP Muhammadiyah 1 Sleman: “Pada awal tahun pelajaran, hanya dilakukan secara pengamatan dan identifikasi terhadap kecenderungan berkebutuhan khusus bagi peserta didik, setelah data masuk, kemudian dilakukan asesmen peserta didik bekerja sama dengan lembaga resmi asesmen.¹⁹

Hasil wawancara dengan guru penanggung jawab di SMP Muhammadiyah 2 Godean adalah sebagai berikut: “Asesmen dilaksanakan bekerja sama dengan SLB dengan fasilitator Guru Pembimbing Khusus.”²⁰

¹⁸ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 1 Godean tanggal 5, 6, 7, 8, 9 Mei 2018

¹⁹ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 1 Sleman tanggal 5, 6, 7, 8, 9 Mei 2018

²⁰ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 2 Godean tanggal 5, 6, 7, 8, 9 Mei 2018

Sementara wawancara dengan guru penanggung jawab di SMP Muhammadiyah 1 Moyudan adalah sebagai berikut: "Asesmen dilaksanakan dengan cara identifikasi peserta didik , kemudian peserta didik yang cenderung inklusif dinilai oleh guru GPK dan Guru BK."²¹

Hasil kegiatan Asesmen dari keempat sekolah tersebut, dapat digolongkan jenis kebutuhan khusus:

Tabel 1.15.

Reduksi Data Proses Hasil Wawancara dan Dokumentasi

No	Jenis ABK	SMP Muh 1 Sleman	SMP Muh 1 Godean	SMP Muh 2 Godean	SMP Muh 1 Moyudan
1.	Lambat belajar	17	26	17	10
2.	Tuna Daksa	1	-	1	-
3.	Hiperaktif/ADHD	1	2	1	-
4.	Tuna rungu	1	-	-	-
5.	Jumlah	20	28	19	10

Berdasarkan uraian dan tabel 1.15., bahwa keempat sekolah Muhammadiyah yang diteliti telah mengadakan kegiatan asesmen dalam rangka mengetahui tingkat kebutuhan peserta didik. Kegiatan ini sangat relevan dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 2 bahwa "jenis kelainan anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat bervariasi, dalam hal ini, sekolah memiliki variasi jumlah ABK yang disertai dengan jenis kebutuhan khusus yang berbeda-beda pula." Selain itu kegiatan asesmen sangat relevan dengan Permendiknas

²¹ Hasil Wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 1 Sleman tanggal 5, 6, 7, 8, 9 Mei 2018

No. 70 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 sekolah menerima peserta didik dengan kelainan dan/atau bakat istimewa atas pertimbangan terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut.

Selain kegiatan asesmen, dalam evaluasi proses juga dilakukan evaluasi terhadap kegiatan lainnya, seperti kegiatan pelaksanaan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terlaksana dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, kegiatan ismuba (keagamaan), sementara kegiatan ekstrakurikuler terlaksana melalui kegiatan pengembangan diri.

Proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Sleman, peserta didik berkebutuhan khusus ditempatkan secara bersama dengan peserta didik umum dan berlangsung dalam 1 kelas, sementara setiap 2 kali dalam seminggu berlangsung proses pembelajaran kelompok peserta didik berkebutuhan khusus oleh guru pembimbing khusus (GPK) selama waktu 60 menit. Keadaan ini juga dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Godean, SMP Muhammadiyah 2 Godean, SMP Muhammadiyah 1 Moyudan. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh GPK di empat SMP Muhammadiyah yang diteliti telah relevan dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1, bahwa “Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.”

Kegiatan terpenting dalam program pendidikan inklusif adalah adanya program pembelajaran individual (PPI). Berdasar keragaman yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus atas kebutuhannya, maka ada proses pembelajaran yang harus dilaksanakan secara individual, selain juga menyangkut tentang KKM yang harus dibedakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dari keempat sekolah yang diteliti, ternyata belum melaksanakan program pembelajaran individual yang bisa dilaksanakan di

saat-saat tertentu, seperti jam istirahat ataupun jam di luar sekolah. Hasil temuan ini sesuai menurut Direktorat Pembinaan Dasar (212) tentang salah satu prinsip individual, dimana “guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, bagi dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai”.

Kegiatan evaluasi (penilaian) bagi peserta didik inklusif dilaksanakan oleh keempat sekolah tersebut, meliputi kegiatan penilaian harian, penilaian tengah semester (PTS), penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian akhir tahun (PAT). Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap kegiatan evaluasi belajar, bahwa Program penilaian hasil belajar, di satuan pendidikan Muhammadiyah pada program pendidikan inklusif, menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian hasil belajar masih bersifat umum, khususnya untuk kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Kegiatan ini menunjukkan kurang keberpihakannya terhadap peserta didik inklusif khususnya *Slow learner*, karena dapat dipastikan mereka dalam beberapa materi akan mengalami kesulitan, meskipun demikian karena KKM peserta didik inklusif dibawah dari peserta didik reguler, maka sistem penilaian masih memungkinkan peserta didik inklusif untuk naik di jenjang berikutnya. Hal ini relevan dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1, bahwa “penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

Salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan potensi diri bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbakat adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran oleh satuan pendidikan. Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler telah diadakan oleh masing-masing sekolah Muhammadiyah. Berberapa yang menonjol dari masing-masing sekolah adalah untuk SMP Muhammadiyah 1 Sleman dengan kegiatan sablonisasi, SMP Muhammadiyah 1 Godean dengan karawitannya, SMP Muhammadiyah 2 Godean dengan seni membatiknya dan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan dengan bercocok tanam/hortikultural. Kegiatan ini memberikan nilai tambahan bagi peserta didik inklusif, selain menambah ketrampilan, juga menjadi penyemangat dan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan diri. Semua kegiatan yang dilakukan telah menghasilkan produk yang tentunya menjadi pengalaman bagi setiap peserta didik .

.Di dalam pelaksanaan program inklusif di sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sleman, belumlah secara maksimal mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dalam hal kegiatan workshop, pelatihan pendidikan inklusif belum merata dilaksanakan, selain itu pemberian bantuan untuk sarana prasarana pendukung kegiatan pendidikan inklusif belumlah maksimal seperti ruang terapis inklusif, alat bantu ABK, dll. Selain itu masyarakat juga belum mengetahui betul tentang pendidikan inklusif, sehingga perhatiannya terhadap sekolah inklusif kurang, terkadang sebagian menganggap sekolah tersebut hanya menampung peserta didik yang memiliki nilai kurang dan sebagainya.

Bila dikaitkan dengan kegiatan monitoring. Pemerintah belum melaksanakan secara massif, hanya untuk memenuhi kebutuhan mencukupi laporan pertanggungjawaban. Hal ini tidak sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 12 dimana “pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan monitoring dari pemerintah menjadi penting untuk diselenggarakan, sebab melalui monitoring, pemerintah dapat menilai sampai sejauhmana penyelenggraan sekolah inklusif sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan, sementara bagi pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga harapannya pendidikan inklusif akan semakin baik.

Berdasarkan uraian di atas, hasil dari evaluasi proses, jika ditinjau berdasarkan regulasi pemerintah atau instansi terkait dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.16
Evaluasi Data Proses Empat SMP Muhammadiyah
di Kabupaten Sleman

No.	Prinsip pendidikan inklusif	1	2	3	4
1.	Kegiatan Asesmen (Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 2)	v	v	v	v
2.	Pembelajaran Individual (Direktorat Pembinaan PKLK Tahun 2012, pasal 1)	x	x	x	x
3.	Prinsip penilaian hasil belajar (Permendiknas No. 70/2009 pasal 9 ayat 1)	x	x	x	x
4.	Monitoring Pemerintah (Permendiknas No. 70/2009 pasal 12)	x	x	x	x

Ket :

- 1 = SMP Muhammadiyah 1 Sleman
- 2 = SMP Muhammadiyah 1 Godean
- 3 = SMP Muhammadiyah 2 Godean
- 4 = SMP Muhammadiyah 1 Moyudan
- v = terpenuhi/terlaksana
- x = belum terpenuhi/terlaksana

d. Hasil Data Output

Data yang dipergunakan dalam evaluasi Output meliputi data kenaikan kelas, data kelulusan, data hasil kegiatan budaya sekolah, data kegiatan Keagamaan (sholat dan BTAQ), data melanjutkan studi.

Data-data yang terkumpul dilakukan validasi data dan direduksi, kemudian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.17.

Hasil Reduksi Data Output Hasil Wawancara dan Dokumnetasi

No.	Data	SMP Muh 1 Sleman	SMP Muh 1 Godean	SMP Muh 2 Godean	SMP Muh 1 Moyudan
1.	Ketuntasan belajar peserta didik ABK	Sesuai KKM	Sesuai KKM	Sesuai KKM	Sesuai KKM
2.	Kelulusan peserta didik ABK	ya	ya	ya	ya
3.	Melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA	ada	ada	ada	ada
4.	Peserta didik ABK berprestasi	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Dari reduksi data di atas menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kekhususan dalam penentuan KKM, sehingga harapannya dapat lanjut pada jenjang berikutnya, begitu juga dengan kondisi lulusan peserta didik berkebutuhan khusus dapat melanjutkan jenjang pendidikan di atasnya, hal ini sesuai dengan tujuan wajib belajar 9 tahun.

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah ketuntasan belajar peserta didik ABK pada empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah Kabupaten Sleman:

Tabel 1.18. Data Kenaikan Kelas Peserta Didik ABK kelas 7 (T. A. 2017/2018)

Sekolah	Jumlah ABK Kelas 7	Jumlah ABK naik kelas	Keterangan (%)
SMP Muh 1 Sleman	6	6	100 %
SMP Muh 1 Godean	8	8	100 %
SMP Muh 2 Godean	5	5	100 %
SMP Muh 1 Moyudan	4	4	100 %

Tabel 1.19. Data Kenaikan Kelas Peserta Didik ABK kelas 8 (T. A. 2017/2018)

Sekolah	Jumlah ABK Kelas 8	Jumlah ABK naik kelas	Keterangan (%)
SMP Muh 1 Sleman	6	6	100 %
SMP Muh 1 Godean	7	7	100 %
SMP Muh 2 Godean	7	7	100 %
SMP Muh 1 Moyudan	2	2	100 %

Tabel 1.20. Data Kelulusan Peserta Didik ABK kelas 9 (T. A. 2017/2018)

Sekolah	Jumlah ABK Kelas 9	Jumlah ABK naik kelas	Keterangan (%)
SMP Muh 1 Sleman	8	8	100 %

SMP Muh 1 Godean	8	8	100 %
SMP Muh 2 Godean	7	7	100 %
SMP Muh 1 Moyudan	4	4	100 %

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan kelas 7, kelas 8 dalam tahun ajaran 2017/2018 tidak ada yang tinggal kelas, sementara peserta didik ABK kelas 9 dapat lulus menyelesaikan jenjang SMP, meskipun sebagian besar mereka memiliki perkembangan akademik di bawah rerata atau standar. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan penyelenggara inklusif menetapkan KKM dan kriteria ketuntasan belajar yang berbeda bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini untuk mengurangi dampak ketuntasan belajar yang dialami oleh peserta didik tersebut. Harapan yang diinginkan agar peserta didik berkebutuhan khusus tidak putus belajar ditengah pendidikan, karena alasan tidak naik kelas, lambat belajar, terlalu aktif tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa bergerak dengan cepat dan sebagainya. Oleh karena itu SMP Muhammadiyah 1 Sleman, SMP Muhammadiyah 1 Godean, SMP Muhammadiyah 2 Godean dan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat menikmati program wajib belajar 9 tahun, bahkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan atas atau berikutnya. Hal ini sesuai dengan UU nomor 23 pasal 51 yang berbunyi “ anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan *aksesibilitas* untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

Dari hasil evaluasi produk, peserta didik berkebutuhan khusus di empat sekolah tersebut selalu dinaikkan kelas dan bagi yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama

(SMP), diarahkan untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang atas, seperti SMK. Oleh karena, pada saat selesai melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer, siswa diberi sosialisasi oleh beberapa sekolah SMK dari kabupaten Sleman dan sekitarnya.

B. Hasil Evaluasi Program Pendidikan Inklusif di Empat Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dievaluasi sebagai program pendidikan inklusif di empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Konteks

- a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif telah memiliki latar belakang dan tujuan yang sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dimana peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif mengutamakan siswa berkebutuhan khusus dari lingkungan masyarakat terdekat. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan Sapon-Shevin O'neil (1995) bahwa “pendidikan inklusif sebagai suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular bersama-sama teman seusianya”.
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif telah mendapatkan ijin operasional

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, hal ini telah sesuai dengan Permendiknas No. 70 pasal 4 ayat 1 dimana “Pemerintah kabupaten/kota minimal menunjuk satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus.

2. Input

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif, pada saat penerimaan peserta didik baru, tidak berdasarkan atas latar belakang peserta didik, latar belakang akademik, kondisi fisik dan latar belakang orang tua, tetapi semua siswa yang mendaftar di keempat sekolah tersebut diterima semua. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif, sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dimana peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini juga sesuai dengan UU nomor 23 pasal 51 yang berbunyi “ anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan *aksesibilitas* untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif telah memenuhi ketentuan jumlah siswa berkebutuhan khusus dalam 1 kelas. Hal ini sesuai dengan Dadang Karnida (2015) bahwa dalam 1 kelas tidak boleh ada lebih dari 2 jenis anak luar biasa dan jumlahnya tidak lebih dari 5 anak.

- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif, Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) sudah memenuhi ketentuan yaitu minimal satu, hanya saja ada yang belum memiliki latar belakang kompetensi pendidikan inklusif. Hal ini sesuai den Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 yang menentukan bahwa “pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif”.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif menggunakan kurikulum standar nasional (kurikulum 2013) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan Direktorat PKLK Pendidikan Dasar (2012) bahwa “kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum.
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif belum memberikan bimtek, workshop, pelatihan kepada semua pendidikan dan tenaga kependidikan, sehingga masih banyak pendidik dan tenaga pendidikan yang belum memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan kegiatan pendidikan inklusif. Keadaan ini tentunya juga menjadi tanggungjawab pemerintah setempat. Hal ini tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 10 ayat 3, 5, dan 6 yang menjelaskan

bahwa “pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif”.

- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif masih menggunakan sarana prasarana yang sudah dimiliki dan belum memiliki ruang terapi dan alat bantu inklusif, sehingga dalam hal ini kurang mendukung dalam proses pendidikan inklusif. Menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007) bahwa “sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif cenderung sama dengan sekolah reguler pada umumnya”.

3. Proses

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif, telah melaksanakan asesmen. Asesmen tersebut dilaksanakan dalam rangka mengetahui karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan agar pembuatan kurikulum, pembuatan perangkat pembelajaran serta proses pembelajaran yang dilakukan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusif.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif belum melibatkan semua sumber daya manusia dalam satuan pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) dalam melaksanakan proses pendidikan inklusif. Kegiatan pendidikan inklusif lebih banyak dilaksanakan oleh Guru Penanggung jawab program, Guru BK dan Guru Pembimbing Khusus Inklusif (GPK). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keterlibatan seperti yang

dibenarkan oleh Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2012) bahwa “salah satu prinsip penyelenggaraan inklusif adalah prinsip keterlibatan, dimana penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait”.

- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif, belum melaksanakan program pembelajaran individual (PPI), sehingga hal-hal khusus yang harus disampaikan atau diperlakukan secara sendiri kepada siswa berkebutuhan khusus, belum terlaksana. Hal ini tidak sesuai dengan Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2012) tentang salah satu prinsip pembelajaran sekolah inklusif yaitu prinsip individual, dimana “guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sesuai”.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif telah mendapatkan perhatian dari pemerintah, hanya saja belum melaksanakan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, hal ini telah sesuai dengan Permendiknas No. 70 pasal 4 ayat 1 dimana “Pemerintah kabupaten/kota minimal menunjuk satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus.

4. Output

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif senantiasa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa berkebutuhan khusus agar dapat menikmati program wajib belajar 9 tahun, bahkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan atas atau berikutnya. Hal ini sesuai dengan UU nomor 23 pasal 51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan *aksesibilitas* untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Mereka diupayakan naik kelas, sehingga nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal dibuat sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif, senantiasa mendorong lulusannya untuk melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya seperti SMK, SMA, dan MA, khususnya lebih kepada sekolah yang bisa lebih membuka lebih dalam kemampuan lain yang dimiliki, seperti SMK yang memiliki beberapa jurusan ketrampilan.